

Analisis Ketimpangan Antar Kabupaten/Kota Di Provinsi Sumatera Utara

Ragel Yona Putri¹, Puti Andiny², Ahmad Ridha³

^{1,2,3}Universitas Samudra, Indonesia

E-mail: putiandiny@unsam.ac.id¹, ragelyonaputri@gmail.com²

Article History:

Received: 03 Desember 2025

Revised: 30 Januari 2026

Accepted: 01 Maret 2026

Keywords: Indeks

Williamson, Pendapatan

Perkapita, Jumlah Penduduk.

Abstract: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar tingkat ketimpangan pendapatan antar Kab/Kota di Provinsi Sumatera Utara. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data jumlah pendapatan perkapita dan jumlah penduduk selama tahun 2010 sampai dengan 2024. Metode analisis data yang digunakan untuk mengukur ketimpangan pendapatan antar wilayah. Berdasarkan hasil perhitungan Indeks Williamson, secara rata-rata nilai Indeks Williamson Wilayah Kab/Kota di Provinsi Sumatera Utara selama tahun 2010 sampai dengan 2024 yaitu sebesar 0,64. Kab/Kota di Provinsi Sumatera Utara sudah menunjukkan nilai yang baik, hal ini dikarenakan nilai Indeks Williamson cenderung mendekati angka 0.

PENDAHULUAN

Pertumbuhan ekonomi yang tinggi belum mencerminkan pembangunan ekonomi yang sukses, Karena kesetaraan tidak selalu menyertai kemajuan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi yang cepat sebenarnya akan memengaruhi ketimpangan dan distribusi pendapatan. Tingkat pertumbuhan yang tinggi akan membutuhkan waktu yang lama untuk dicapai jika perkembangan ekonomi lebih berfokus pada kesetaraan pendapatan. Di sisi lain, akan ada peluang yang lebih besar untuk terjadinya ketimpangan pendapatan jika pembangunan lebih berfokus pada pencapaian angka laju pertumbuhan ekonomi (Arif & Wicaksani 2017).

Tingkat kesejahteraan di berbagai wilayah sangat dipengaruhi pada perbedaan ketimpangan pendapatan antar wilayah. Ketika pemerintah daerah merumuskan kebijakan pembangunan, secara tidak langsung dipengaruhi oleh faktor-faktor yang sama yang menyebabkan ketidakmerataan pembangunan regional. Selain itu, masalah sosial yang sering muncul selama proses pembangunan di berbagai wilayah relatif rendah, sehingga pembangunan dapat berlangsung secara merata di seluruh wilayah Indonesia. Pembangunan daerah berkelanjutan memiliki potensi besar untuk menciptakan kesejahteraan yang merata di tengah masyarakat. Namun, tantangan utama dalam proses ini adalah ketimpangan Pembangunan sosial dan ekonomi di berbagai wilayah. Ketimpangan tersebut, dalam skala makro, disebabkan oleh ketidak seimbangan alokasi berbagai sumber daya, termasuk sumber daya manusia, sumber daya alam, teknologi, dan kapital. Kondisi ini menimbulkan kesenjangan dalam tingkat kemajuan antar wilayah.

Pembangunan daerah yang berkelanjutan memiliki potensi besar untuk menciptakan kesejahteraan yang merata di tengah masyarakat. Namun, tantangan utama dalam proses ini

adalah ketimpangan pembangunan yang terjadi di berbagai daerah. Ketimpangan tersebut, dalam skala makro, disebabkan oleh ketidak seimbangan alokasi berbagai sumber daya, termasuk sumber daya alam, sumber daya manusia, infrastruktur fisik, teknologi, dan kapital. Kondisi ini menimbulkan kesenjangan dalam tingkat kemajuan antar wilayah.

**Tabel 1. Rasio Gini Kabupaten atau Kota di Provinsi Sumatera Utara
Tahun 2020-2024**

Kab/Kota	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Nias	0,2512	0,2452	0,2751	0,2791	0,2470
Mandailing Natal	0,2478	0,2403	0,2441	0,2491	0,2500
Tapanuli Selatan	0,2022	0,2564	0,2091	0,2191	0,2060
Tapanuli Tengah	0,3351	0,2917	0,2331	0,2411	0,2340
Tapanuli Utara	0,2867	0,2766	0,2421	0,2621	0,2420
Toba	0,2903	0,2719	0,3051	0,2951	0,3480
Labuhan Batu	0,2715	0,2564	0,2781	0,2441	0,2510
Asahan	0,2605	0,2441	0,2551	0,2601	0,2480
Simalungun	0,2951	0,2641	0,2621	0,2951	0,2570
Dairi	0,2706	0,2268	0,2211	0,2411	0,2150
Karo	0,2706	0,2327	0,2361	0,2401	0,2140
Deli Serdang	0,3121	0,2628	0,2701	0,2951	0,2620
Langkat	0,2378	0,2381	0,2601	0,2571	0,2600
Nias Selatan	0,2865	0,2411	0,2231	0,2611	0,2470
Humbang Hasundutan	0,2464	0,3043	0,2581	0,2561	0,3020
Pakpak Bharat	0,2475	0,2421	0,2741	0,2511	0,2620
Samosir	0,3175	0,2735	0,2981	0,2511	0,2380
Serdang Bedagai	0,2621	0,2287	0,2401	0,2251	0,2420
Batu Bara	0,2592	0,2396	0,2431	0,2551	0,2580
Padang Lawas Utara	0,2283	0,2547	0,2451	0,2411	0,2230
Padang Lawas	0,2653	0,2525	0,2271	0,2251	0,2240
Labuhanbatu Selatan	0,1935	0,2317	0,2471	0,2311	0,2120
Labuanbatu Utara	0,2624	0,2431	0,2761	0,2381	0,2390
Nias Utara	0,2506	0,2359	0,2391	0,2281	0,2340
Nias Barat	0,2339	0,2238	0,2101	0,2081	0,2190
Sibolga	0,2912	0,2764	0,3461	0,2461	0,3130
Tanjungbalai	0,2716	0,2477	0,2451	0,2381	0,2360
Pematangsiantar	0,3362	0,3076	0,3211	0,3291	0,2970
Tebing Tinggi	0,3337	0,3441	0,3341	0,3171	0,3350
Medan	0,3199	0,4021	0,3991	0,3731	0,3560
Binjai	0,3244	0,2903	0,3021	0,3181	0,3120
Padangsidempuan	0,3538	0,3101	0,2751	0,2671	0,2960
Gunungsitoli	0,3223	0,3166	0,3031	0,3081	0,2770

Sumber : Badan Pusat Statistik 2025

Sumatera Utara sebagai salah satu provinsi di Indonesia yang terletak di pulau Sumatera

juga tidak terlepas dari masalah ketimpangan seperti provinsi lainnya. Perkembangan penduduk yang tinggi dapat menghambat suatu wilayah atau daerah untuk mencapai salah satu tujuan terpenting dari pembangunan Ekonomi, yaitu masalah distribusi pendapatan. Pertumbuhan penduduk yang tinggi akan menyebabkan kesenjangan yang sudah ada di antara beberapa kelompok masyarakat yang semakin melebar luas, sebagaimana di ditampilkan dalam tabel. 1 Di jelaskan bahwa rasio gini antar Kab/Kota di Provinsi Sumatera Utara menunjukkan fluktuasi yang signifikan selama periode 2020 hingga 2024. Rata-rata nilai rasio gini yang tertinggi pertama berada di Kota Medan, dengan rata-rata 0,3701 dimana pada tahun 2021 yaitu sebesar 0,4021 dan mengalami penurunan pada tahun 2020 sebesar 0,3199 yang dimana Kota Medan, sebagai ibu Kota Provinsi dan pusat Ekonomi utama secara konsisten memiliki nilai rasio gini yang lebih tinggi dibandingkan dengan Kota-Kota lainnya. Dan nilai rasio gini dengan rata-rata terendah yaitu Kab Labuhanbatu Selatan dimana pada tahun 2024 sebesar 0,2120 namun pada tahun 2020 mengalami penurunan sebesar 0,1935, hal ini disebabkan oleh karakteristik wilayah yang cenderung agraris dan homogen dalam struktur pendapatan.

Rata-rata nilai rasio gini yang tertinggi menunjukkan bahwa ketimpangan pendapatan di Provinsi Sumatera Utara masih menjadi isu yang memerlukan perhatian serius. Ketimpangan ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk pada tahun 2019 yaitu terjadinya Covid-19 yang memberikan dampak penurunan aktivitas Ekonomi dan pendapatan yang menyebabkan penurunan signifikan dalam aktivitas Ekonomi, terutama di sektor informal yang banyak ditempati oleh masyarakat dengan penghasilan menengah ke bawah. Dan akses yang tidak merata terhadap sumber daya alam, pendidikan, dan peluang Ekonomi di berbagai wilayah. Perbedaan dalam investasi, infrastruktur, dan kebijakan pembangunan juga turut berkontribusi terhadap ketimpangan pendapatan antar Kabupaten dan Kota.

Pembangunan Ekonomi yang berkelanjutan di Provinsi Sumatera Utara telah memberikan peningkatan Ekonomi dan sosial bagi masyarakat. Namun, meskipun terjadi peningkatan, masih terdapat ketimpangan yang signifikan antara Kabupaten dan Kota di provinsi ini. Ketimpangan ini dapat dilihat dari berbagai indikator seperti pendapatan, dan tingkat pengangguran.

LANDASAN TEORI

1. Teori Ketimpangan

Menurut Thee Kian Wie (dalam Kiton, 2019) menyatakan bahwa ketidakmerataan distribusi pendapatan dari sudut pandangan Ekonomi dapat dibagi atas: Ketimpangan pembagian pendapatan antar golongan penerima pendapatan (*size distribution oncome*), Ketimpangan pembagian pendapatan antar daerah perkotaan dan daerah pedesaan (*urban rural income disparities*), Ketimpangan pembagian pendapatan antar daerah (*regional income disparities*), Ketimpangan pembangunan antar daerah dengan pusat dan antar daerah dengan daerah lain adalah merupakan suatu yang wajar, karena adanya perbedaan dalam sumber daya dan awal pelaksanaan pembangunan antar daerah menurut Williamson (dalam Kiton, 2019).

Williamson menjelaskan hipotesa U terbalik pada lingkup wilayah bahwa pada saat pendapatan perkapita meningkat, akan terjadi peningkatan kesenjangan wilayah, lalu bertahan dalam jangka waktu tertentu dan kemudian menurun. Implikasi yang dapat diturunkan bahwa ketimpangan pendapatan antar regional merupakan konsekuensi dari pembangunan dan akan hilang dengan sendirinya sejalan dengan kedewasaan pembangunan itu sendiri.

2. Teori PDRB Perkapita

PDRB Perkapita menyatakan rata-rata nilai tambah bruto yang dihasilkan oleh setiap penduduk disuatu daerah dalam setahun. Salah satu komponen dalam nilai tambah tersebut adalah upah dan gaji yang diterima masyarakat sebagai balas jasa tenaga kerja. Jika PDRB per kapita meningkat, secara hipotensis pendapatan masyarakat juga meningkat, sehingga ukuran ini juga sering dijadikan salah satu indikator kesejahteraan masyarakat Yuliati (2018).

PDRB suatu wilayah yang tinggi menandakan wilayah tersebut memiliki perekonomian yang baik. Sebaliknya, PDRB suatu wilayah yang rendah menandakan perekonomian wilayah tersebut tidaklah dalam keadaan baik. Perekonomian yang dimaksud yaitu perekonomian yang dapat menunjang kehidupan masyarakat sehingga tidak terjadi kemiskinan. PDRB suatu wilayah tinggi apabila wilayah tersebut dapat mengoptimalkan potensi wilayahnya sendiri dengan memanfaatkan sarana dan prasarana yang memadai. PDRB yang tinggi akan menekan tingkat kemiskinan, karena dengan tingginya PDRB pembangunan dapat dioptimalkan, sehingga tercapai kesejahteraan Masyarakat (Damanik & Sidauruk, 2020).

3. Teori Jumlah Penduduk

Penduduk yaitu sebagai pemacu pembangunan karena populasi yang lebih besar sebenarnya adalah pasar potensial yang menjadi sumber permintaan akan berbagai macam barang dan jasa yang kemudian akan menggerakkan berbagai macam kegiatan Ekonomi sehingga menciptakan skala Ekonomi dalam produksi yang akan bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor dominan yang mempengaruhi kemiskinan dari hasil menguntungkan semua pihak, menurunkan biaya produksi dan menciptakan sumber pasokan atau penawaran tenaga kerja murah dalam jumlah yang sangat memadai sehingga pada gilirannya akan merangsang output atau produksi agregat yang lebih tinggi lagi. Dan pada akhirnya diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, yang berarti tingkat kemiskinan akan turun (Fadillah *et al.*, 2023).

METODE PENELITIAN

Ruang lingkup penelitian ini merupakan kajian ekonomi regional yang mengkaji tentang analisis ketimpangan antar Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yang meliputi data ketimpangan, jumlah penduduk dan PDRB Perkapita dari tahun 2010 hingga 2024. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif deskriptif, yang bertujuan untuk menggambarkan fenomena secara sistematis dan faktual. Objek penelitian ini adalah ketimpangan antar kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Utara. Teknik analisis data yang di gunakan dalam penelitian ini yaitu Indeks Williamson untuk mengetahui Ketimpangan Antar Kab/Kota di Provinsi Sumatera Utara.

Metode Indeks Williamson dalam penelitian ini digunakan untuk menghitung tingkat ketimpangan pembangunan antar wilayah, khususnya wilayah-wilayah yang ada di Pulau Sumatera yang terdiri dari jumlah penduduk dan PDRB perkapita. Indeks Williamson (IW) berkisar antara 0 – 1, berdasarkan Indeks Williamson ketimpangan pembangunan antar wilayah dapat

Dirumuskan sebagai berikut (Sjafrizal, 2018):

- a. Apabila $IW < 0,3$ artinya tingkat ketimpangan pembangunan antar wilayah rendah.

- b. Apabila IW berada diantara 0,3 – 0,5 artinya ketimpangan pembangunan antar wilayah sedang.
- c. Apabila IW > 0,5 artinya ketimpangan pembangunan antar wilayah tinggi. Pengukuran tingkat ketimpangan pembangunan pada penelitian ini menggunakan Indeks Williamson, yaitu dengan formulasi sebagai berikut:

$$V_w = \frac{\sqrt{\sum_i (Y_i - \bar{Y})^2 \cdot \frac{f_i}{n}}}{\bar{Y}}$$

Dimana :

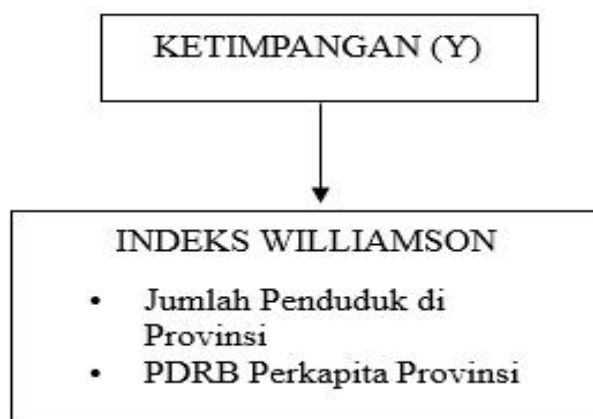
CV_w = Indeks Williamson

f_i = Jumlah penduduk Kabupaten/Kota

n = Jumlah penduduk Provinsi

Y_i = PDRB perkapita Kabupaten/Kota

$\bar{Y}$ = Rata-rata PDRB perkapita Provinsi



Gambar 1. Skema Penelitian

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Hasil

Indeks Williamson pada tahun 2010 sebesar 0,98 hal ini mencerminkan nilai disparitas yang sangat tinggi antar wilayah pada tahun tersebut, hal ini disebabkan oleh adanya pertumbuhan ekonomi di wilayah tertentu, ketimpangan infrastruktur dan kurangnya fasilitas publik. Pada tahun-tahun berikutnya, nilai Indeks Williamson mengalami penurunan yang cukup drastis menjadi 0,54 yaitu pada tahun 2011, lalu cenderung stabil di kisaran 0,55 hingga 0,66 sampai tahun 2024. Rata-rata nilai Indeks Williamson selama periode 2010-2024 adalah 0,64, yang masih menunjukkan tingkat ketimpangan yang tinggi. Tingginya nilai Indeks Williamson ini menandakan bahwa distribusi hasil pembangunan dan pertumbuhan ekonomi antar Kabupaten/Kota masih belum merata. Beberapa wilayah, biasanya kota-kota besar atau pusat pertumbuhan ekonomi, menikmati pertumbuhan yang lebih cepat dan signifikan dibandingkan wilayah lain yang relatif tertinggal.

Hasil Indeks Williamson pada penelitian ini sebagaimana pada tabel 2.

Tabel 2. Indeks Williamson 33 Kab/Kota di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2010-2024

INDEKS WILLIAMSON 33 KAB/KOTA	INDEKS WILLIAMSON
2010	0,98
2011	0,54
2012	0,55
2013	0,55
2014	0,55
2015	0,55
2016	0,65
2017	0,65
2018	0,65
2019	0,66
2020	0,66
2021	0,66
2022	0,66
2023	0,65
2024	0,65
Rata-rata Indeks Williamson	0,64

Sumber : Badan Pusat Statistik 2025 (data diolah)

2. Pembahasan

Hasil ini menunjukkan bahwa Kab/Kota di Provinsi Sumatera Utara yang memiliki pendapatan perkapita lebih besar ternyata belum tentu memiliki tingkat ketimpangan pendapatan yang baik atau semakin merata pendapatannya. Hasil ini dapat dilihat dimana Kota Medan yang memiliki tingkat pendapatan yang tinggi belum tentu memiliki tingkat disparitas yang merata. Hal ini sesuai dengan penelitian Junisa et al (2020) yang menyatakan meskipun terdapat peningkatan pendapatan perkapita di beberapa daerah, hal tersebut tidak serta merta meningkatkan pemerataan pembangunan. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa daerah yang struktur ekonominya sektor pertanian memiliki distribusi pendapatan yang relatif lebih merata bila dibandingkan dengan daerah yang memiliki struktur ekonomi industri seperti Kota Medan.

Ketimpangan pendapatan selain dipengaruhi oleh posisi berada di struktur ekonomi agraris maupun industri, ketimpangan pendapatan juga dapat terjadi disebabkan oleh banyak faktor lain seperti meningkatnya jumlah penduduk namun lapangan usaha yang tersedia masih kurang memadai, sehingga rendahnya angka pendapatan masyarakat akan mempengaruhi ketidakmerataan Pembangunan. Selain itu, pengelolaan tingkat kandungan sumber daya alam, kondisi demografis, lancarnya mobilitas barang dan jasa dan lain sebagainya dapat menjadi solusi untuk mengurangi ketimpangan pendapatan antar Kab/Kota di Provinsi Sumatera Utara.

Di sisi lain, beberapa penelitian kurang relevan terhadap fokus analisis ketimpangan antar wilayah dalam penelitian ini. Contohnya adalah dokumen perencanaan strategis seperti RPJMD Provinsi Sumatera Utara 2025–2029 (*RPJMD Sumut 2025-2029, Ini Sembilan Target Dan Sasaran Pemprov Sumut*, n.d.) yang lebih

menyoroti sasaran pembangunan makro dan indikator kinerja tanpa membedah secara spesifik kesenjangan antar kabupaten/kota. Begitu pula dengan penelitian yang hanya meninjau hubungan antara PDRB dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), atau pengaruh PDRB terhadap tingkat kemiskinan, yang cenderung bersifat agregatif dan tidak menyentuh aspek spasial ketimpangan secara langsung. Kelemahan utama pada studi-studi ini adalah absennya penggunaan metode Indeks Williamson ataupun Rasio Gini sebagai alat ukur disparitas, yang membuatnya kurang mendukung analisis ketimpangan antar wilayah secara mendalam sebagaimana dijelaskan dalam penelitian ini.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan, Kesimpulan dalam penelitian ini d bahwa ketimpangan pendapatan antar wilayah di Sumatera Utara masih tergolong tinggi sepanjang periode 2010 hingga 2024. Hal ini dibuktikan dengan nilai rata-rata Indeks Williamson sebesar 0,64, yang berada pada kategori ketimpangan taraf tinggi. Meskipun terdapat fluktuasi dalam beberapa tahun, pola ketimpangan tersebut menunjukkan konsistensi dari tahun ke tahun, dengan disparitas tertinggi yang terjadi pada tahun 2010 sebesar 0,98 dan belum menunjukkan tren penurunan yang signifikan hingga 2024.

Temuan ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi yang terjadi di Provinsi Sumatera Utara belum diiringi oleh distribusi pendapatan yang merata. Seperti Kota Medan, sebagai pusat ekonomi memiliki PDRB per kapita yang jauh lebih tinggi dibanding kabupaten-kabupaten seperti Pakpak Bharat atau Nias Barat, yang mencerminkan adanya konsentrasi aktivitas ekonomi yang timpang. Dengan demikian, tujuan penelitian untuk menganalisis tingkat ketimpangan antar kabupaten/kota telah tercapai secara empiris melalui pendekatan kuantitatif menggunakan Indeks Williamson, dan dapat menjadi dasar bagi rekomendasi kebijakan pembangunan yang lebih berpihak pada pemerataan antar wilayah.

DAFTAR REFERENSI

- Andiny, P., Adelida, N., & Meutia, R. (2019). *Analisis Ketimpangan Pembangunan Antar Kabupaten / Kota (Studi Kasus Kabupaten Aceh Timur Dan Kota Langsa)*. 3(1), 47–56.
- Andiny, P., & Mandasari, P. (2017). *Analisis Pertumbuhan Ekonomi dan Kemiskinan Terhadap Ketimpangan Di Provinsi Aceh*. 1(2), 196–210.
- Arif, M., & Wicaksani, R. A. (2017). Ketimpangan Pendapatan Propinsi Jawa Timur dan Faktor-faktor yang Mempengaruhinya. *University Research Colloquium*, 323–328.
- Damanik, R. K., & Sidauruk, S. A. (2020). Pengaruh Jumlah Penduduk Dan Pdrb Terhadap Kemiskinan Di Provinsi Sumatera Utara. *Jurnal Darma Agung*, 28(3), 358. <https://doi.org/10.46930/ojsuda.v28i3.800>
- Fadillah, Andiny, P., & Syahputra, R. (2023). *Analisis Pertumbuhan Ekonomi , Jumlah Penduduk dan Indeks Pembangunan Manusia terhadap Distribusi Pendapatan di Aceh Bagian Timur*. 7, 374–387.
- Gurusinga, E. B., Engka, D. S. M., & Tolosang, K. D. (2022). Analisis Ketimpangan Pendapatan Antar Kabupaten Di Provinsi Sumatera Utara. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 22(7), 37–48.
- Harahap, D., Matondang, Z., Harahap, S., & Farizal, N. (2022). Determinants Of Development Inequality Between Regions In North Sumatra Province. *Jurnal Ilmu Manajemen Dan Bisnis Islam*, 8(2), 243–256.

-
- Irmatriyanti, Windari, Havis, M., Asnidar, & Ridha, A. (2023). *Pengaruh IPM, Gini Rasio, Dan Tingkat Kemiskinan Terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka Di Kabupaten Aceh Singkil Irmatriyanti*. 2(4), 262–277.
- Junisa, D., Erviani, D. arum sekar arimbi E. situmorang E., Siagian, F. handayani J., & Jurusan. (2020). Analisis Ketimpangan Pembangunan Antar Daerah Sumatera Utara Bagian Timur. *Quantitative Economics Journal*, 4(4), 236–249. <https://doi.org/10.24114/qej.v4i4.17476>
- Kiton, M. A. (2019). *Analisis Ketimpangan Pembangunan Ekonomi Di Provinsi Sumatera Utara*. III(2), 68–80.
- Mahardiki, D., & Santoso, R. P. (2013). Analisis Perubahan Ketimpangan Pendapatan Dan Pertumbuhan Ekonomi Antar Propinsi Di Indonesia 2006-2011. *Jejak Journal of Economics and Policy*, 5(62), 271–279. <https://doi.org/10.15294/jejak.v7i1.3596>
- Panggarti, U., Zumaeroh, Z., Dwi Purnomo, S., Retnowati, D., & Adhitya, B. (2022). Studi komparatif ketimpangan antar pulau di Indonesia. *Forum Ekonomi*, 24(2), 288–298. <https://doi.org/10.30872/jfor.v24i2.10988>
- Raharti, R., Laras, T., & Oktavianti, O. (2021). Model Ketimpangan Pembangunan Ekonomi di Indonesia. *Jurnal Samudra Ekonomi Dan Bisnis*, 12(2), 257–270. <https://doi.org/10.33059/jseb.v12i2.2422>
- RPJMD Sumut 2025-2029, *Ini Sembilan Target dan Sasaran Pemprov Sumut*. (n.d.).
- Sari, S. F., & Saputra, R. (2022). Analisis Ketimpangan Ekonomi Antar Daerah Di Provinsi Jambi Dengan Pendekatan Indeks Theil. *Jurnal Akuntansi, Manajemen Dan Ekonomi*, 1(2), 224–232.
- siahaan naomi amelia. (2024). Pengaruh Infrastruktur Transportasi dan Kepadatan Penduduk terhadap PDRB Perkapita di Provinsi Sumatera Utara. <https://Repository.Usu.Ac.Id> Undergraduate Theses 2024.
- Sipahutar, S. R., & Nasution, A. M. (2023). Pengaruh IPM, PDRB Perkapita, dan Jumlah Pengangguran Terhadap Jumlah Penduduk Miskin Provinsi Sumatera Utara. *PROFJES: Profetik Jurnal Ekonomi Syariah*, 2(1).
- Sjafrizal, P. (2008). *Ekonomi Regional*. Banduose Media.
- Stepanus, P. (2023). *Analisis Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto Per Kapita, Inflasi Dan Suku Bunga Acuan Terhadap Konsumsi Per Kapita Di Sumatera Utara Tahun 2007-2021*.
- Tiara, S. (2016). Analisis Ketimpangan Distribusi Pendapatan di Propinsi Sumatera Utara. *Jurnal Ekonomikawan*, 5, 1–16. <https://www.neliti.com/publications/77513/analisis-ketimpangan-distribusi-pendapatan-di-propinsi-sumatera-utara>
- Wibowo, T. (2016). Ketimpangan Pendapatan dan Middle Income Trap Income Inequality and Middle Income Trap. *Kajian Ekonomi Keuangan*, 20(2), 112–132. <http://fiskal.kemenkeu.go.id/ejournal>
- Yuliati, I. A. (2018). *Perkembangan Ketimpangan Pendapatan, Pembangunan Manusia , Dan Pembangunan Gender Kabupaten Sleman Tahun 2018*. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sleman.